**PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL OLEH KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TEMBILAHAN**

Oleh: Dira Heriyanti

Email: Diradira284@gmail.com

Pembimbing : Mimin Sundari Nst, S.Sos.,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Abstract

The Indragiri Hilir regency is a fairly wide water territory, and thus it is often used as a route to transport illegal goods such as liquor which are often imported from free territory. There are still many unofficial ports and jetty which are prone to have smuggling activity, and also the difficulty to access the crime scene, thus causing an increase in the number of illegal liquor smuggling from 2017 – 2019. The expensive customs cost of liquor and the lack of firm punishment also cause an increase in the number of illegal liquor smuggling. The goal of this research is to find out how is the illegal liquor distribution control by the customs and excise control and services office in Indragiri Hilir, and also to find out the illegal liquor distribution control inhibition factors. The type of this research is qualitative research, by connecting the primary data with the secondary data. The data are gathered from interview, observation, and documentation, which then are analyzed thus a conclusion to the research problem can be made. This research conclude that the illegal liquor distribution control by the customs and excise control and services office in Indragiri Hilir is not yet optimal, this is caused by several inhibition factors such as the lack of sufficient manpower, insufficient infrastructure such patrol boats which are used to conduct surveillance, limited monetary resources, and the low awareness of the import actors.

Keywords : Management, Control, Smuggling

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintahan instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha diluar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, sistem yang diangkut melalui laut membuat penyelundupan menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang ilegal ke tanah air. Ditambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu dalam hal ini Indonesia dan negara tetangga, yang posisi Indonesia sebagai anggota kelompok MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang ilegal semakin sering terjadi.

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang mencolok antar harga didalam negeri dengan harga barang diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut sering terdengar adalah tindak penyelundupan miras ilegal.

Minuman keras atau yang sering

disebut miras merupakan minuman beralkohol, yaitu minuman mengandung etanol. Etanol adalah salah satu bahan kimia psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsinya. Dalam istilah kepabeanan dan cukai minuman beralkohol disebut dengan MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan setiap badan usaha yang akan memproduksi MMEA maka harus memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai). Di Indonesia sendiri penjualannya juga dibatasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 pasal 3 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud diatas ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya dimana hampir seluruhnya yang masuk ke Indonesia adalah Minuman Keras Ilegal.

Minuman keras ilegal adalah Produk minuman alkohol yang tidak dikenakan pajak di Negara yang mengkonsumsi, karena biasanya diproduksi, didistribusikan dan dijual diluar jalur formal dan diluar pengawasan pemerintah. Sedangkan Minuman keras legal adalah produk minuman beralkohol resmi yang diproduksi dan

dijual sesuai dengan kerangka regulasi dan tercatat didalam statistik resmi di Negara yang memproduksi, negara yang mengkonsumsi, atau keduanya.

Maraknya penyelundupan minuman keras ilegal juga disebabkan karena besarnya tarif cukai yang dikenakan sehingga membuat oknum-oknum melakukan tindakan-tindakan penyelewengan penyelundupan minuman keras ilegal. Besaran tarif cukai ditentukan berdasarkan per liternya dimana semakin tinggi kadar etil alkohol didalam minuman keras maka semakin tinggi pula tarif cukainya hal ini lah yang mengakibatkan banyak oknum-oknum tertentu semakin melakukan tindakan penyelundupan minuman keras ilegal yang tidak memiliki pita cukai, untuk itu pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai harus terus ditingkatkan agar tidak merugikan keuangan negara ,karena sumber kas Negara terbesar adalah dari sektor pajak diantaranya adalah dari Bea dan Cukai.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas wilayah 18.812,97 km² Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut. Hal ini lah yang menyebabkan Indragiri hilir sering terjadi kasus penyelundupan dan mengakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait karena lokasi wilayahnya yang sulit dijangkau yang rata-rata adalah sungai-sungai.Serta banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan yang sering dijadikan tempat bongkar barang-barang ilegal seperti minuman keras ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang sering di import dari

kawasan bebas dengan berbagai jenis merek. Letaknya yang strategis yaitu ditepi sungai membuat oknum-oknum tertentu sering melakukan penyelundupan barang-barang ilegal melalui laut dan berhenti dipelabuhan.

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Pengertian penyelundupan terdapat didalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, pada Pasal 102, Pasal 102 A dan 102 B yang menentukan bahwa : “Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”. Penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat.

Instansi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan Negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Instansi vertikal DJBC yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan ekspor impor barang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilaan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar kedalam kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai. Selain itu tugas dan fungsi KPPBC adalah mengawasi kegiatan

ekspor dan import, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol, peredaran rokok, barang elektronik, dan lain sebagainya.

Salah satu implementasi dari fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap barang – barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Pengawasan dilakukan atas jalur masuk dan keluarnya melalui darat, laut, maupun udara. Sebagai perlindungan masyarakat (*Comunity Protector*) bea dan cukai harus meningkatkan pengawasan atas barang –barang yang dilarang atau dibatasi impor ekspornya ke/dari Indonesia seperti barang – barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional, dan lain – lain, salah satu contohnya adalah miras ilegal.

Dalam melakukan pemberantasan minuman keras ilegal merupakan tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan, yaitu melaksanakan tugas intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Bidang penyidikan dan penindakan terdiri dari :

1. Subseksi Intelijen
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Tindakan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan

penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Adapun beberapa fenomena yang peneliti temukan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Kabupaten Indragiri hilir rata-rata merupakan daerah perairan sehingga sering dijadikan jalur tempat untuk penyelundupan barang-barang ilegal, seperti minuman keras yang sering di import dari kawasan bebas.
2. Masih banyak terdapat pelabuhan tidak resmi yang rawan terjadi praktik penyelundupan
3. Wilayah Inhil yang diawasi cukup luas dan banyak lokasi-lokasi yang sulit dijangkau karena sulitnya akses menuju ke TKP
4. Meningkatnya jumlah penyelundupan minuman keras illegal dari tahun 2017-2019.
5. Mahalnya besaran tarif cukai minuman keras sehingga membuat penyelundupan semakin meningkat.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengawasan peredaran Minuman Keras Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Indragiri Hilir dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat Pengawasan peredaran Minuman Keras Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Indragiri Hilir.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut **Usman (2004:3)** manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus.

Menurut **Serdamayanti (2000:169)** manajemen adalah proses kegiatan perencanaan

kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan menurut **Hasibuan (2005:2)** Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **Ndaraha (2011:159)** manajemen adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan”. Sedangkan Menurut **Marnis (2008:329)**, pengawasan adalah proses permonitoran kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasi yang diharapkan

Menurut **Daryanto (2013:230)**, pengawasan adalah proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan ketentuan-keentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Oleh karena itu pemimpin harus bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pegawai. Apabila suatu instansi melaksanakan pengawasan secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, maka dengan sendirinya kinerja pegawai akan baik.

Menurut **Maringan (2004:61)** menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (prefentive control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

Brantas (2009:195), adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur Pengawasan. **Manullang (2015 : 184)**, mengemukakan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam menilai Pengawasan antara lain :

1. Menetapkan alat pengukur (*standar*)
2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*Corrective Action*)

METODE

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menghubungkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan penelitian yang ada. Data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik analisis data dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan interpretasi data yang diperoleh dari pengamatan maupun dari dokumen-dokumen kemudian menarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut adalah merupakan rangkaian suatu proses yang dilakukan dalam pengawasan. Proses pengawasan menurut **Manullang (2015:184)** dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : menentukan alat ukur/standar, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan terhadap indikator-indikator tersebut diatas dan apakah pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan telah optimal atau belum berdasarkan teori pengawasan yang peneliti gunakan, sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar sehingga dapat menilai jika terdapat pelanggaran. Dengan adanya standar maka diadakan penilaian untuk mengetahui yang salah dan yang benar dan

selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Alat penilai atau standar pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah terdapat standar bagi pelaksanaan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan peredaran minuman keras ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menggunakan Standar berupa Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan Sarana Pengangkut dan/atau barang diatasnya yaitu Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Sarana Pengangkut dan/atau barang diatasnya Nomor SOP 18/TMPC/2018. SOP ini sudah ada tetapi tidak dilakukan oleh Bea dan Cukai Tembilahan dalam melakukan pengawasan karena pengawasan tidak dilakukan secara terjadwal dan tidak memiliki standar waktu. SOP ini menjelaskan proses pemeriksaan sarana pengangkut yang berada pada kade pelabuhan atau apron bandara atau sarana pengangkut darat, Unit SOP ini adalah seksi penindakan dan penyidikan.

2. Melakukan Tindakan Penilaian

Tindakan penilaian ini berarti membandingkan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur atau standar yang digunakan. Dalam fase ini akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian data berupa laporan tertulis, laporan lisan dan pengawasan langsung.

Dalam melakukan pengawasan peredaran miras ilegal Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai khususnya seksi penindakan dan penyidikan mereka melakukan pengawasan secara langsung yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengecek atau mengawasi apakah ada terjadi penyelundupan

barang-barang ilegal khususnya miras ilegal.

Kegiatan Pengawasan dimulai dari kegiatan yang dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan dengan menyusun rancangan, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penyelundupan minuman keras ilegal yang dilakukan oleh bagian seksi intelijen, kemudian dilanjutkan dengan Patroli. Kegiatan patroli ini bisa dilakukan secara mandiri dan juga Pihak Bea dan cukai dapat bekerjasama dengan instansi lain. Selanjutnya hasil penindakan dilakukan berkaitan dengan Patroli yang dilakukan, penindakan berupa pemeriksaan, penyegelan, pencegahan, dan penentuan hasil tindakan. Setelah itu melakukan evaluasi Kinerja dan hasil dari proses pengawasan yang dilakukan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan atau koreksi adalah tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang sama. Teguran dan peringatan merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan saat terjadinya penyimpangan terhadap peraturan yang telah dibuat. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan ini dapat berupa pemberian sanksi ataupun hukuman penjara.

Setelah melakukan pengawasan hal terakhir yang dilakukan adalah mengadakan tindakan perbaikan yaitu petugas Bea dan Cukai akan melakukan penegahan dan penyegelan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat adanya pelanggaran dibidang cukai kemudian pelaku akan diberikan denda dan sanksi dan bahkan hukuman penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila pada saat pemeriksaan tidak ada ditemukan pelanggaran maka sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya akan dilepaskan kembali.

SIMPULAN

Pengawasan peredaran miras ilegal

yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian berdasarkan tiga indikator pengawasan yaitu menentukan alat ukur/standar, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Hal ini ditinjau dimana masih banyak terdapat tindakan penyelundupan miras ilegal dari tahun 2017-2019 jumlah penyelundupan miras ilegal meningkat. Hal ini berdasarkan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan kebanyakan mereka atau sarana pengangkut miras ilegal itu tidak memiliki dokumen-dokumen yang sudah diatur dalam peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2010, bahkan mereka tidak membayar tarif pajak miras tersebut. Kelemahan dalam Pengawasan Peredaran miras ilegal ini belum adanya standar waktu yang efektif dalam kegiatan pengawasannya dimana tidak ada jadwal rutin yang dilakukan, dan juga kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan kelapangan yang menyebabkan masih ada jalur-jalur lintas terselundup yang menjadi tempat selundupan miras ilegal.

Faktor penghambat Pengawasan Peredaran miras ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan adalah terbatasnya sumber daya manusia dilihat dari kualitas dan kuantitasnya yang masih kurang, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan rendahnya tingkat kesadaran pelaku importir sehingga menyebabkan pengawasan peredaran miras ilegal terhambat. Pelaksanaan pengawasan peredaran miras ilegal dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, seperti kualitas petugas dan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan dan juga apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka pengawasan tidak akan berjalan dengan lancar seperti alat transportasi dan sebagainya,

serta keterbatasan biaya dan tingkat kesadaran pelaku importir karena jika pelaku importir mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam melakukan impor miras ke Indonesia maka tidak akan ada miras yang ilegal sehingga tidak ada lagi pajak Negara yang tidak terpungut biaya dan masyarakat pun tidak ada mengkonsumsi miras ilegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, daryanto. 2013. *Pengantar ilmu manajemen dan komunikasi*. Jakarta: prestasi Pustakaraya
- Brantas. 2009. *Dasar-DasarManajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Manullang.2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Maringan, Masry S.2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Marnis, P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, H. (2004). *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Serdamayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.